

EFEKTIVITAS PERENCANAAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BATAM

EFFECTIVENESS OF REGIONAL PLANNING IN REGIONAL DEVELOPMENT IN BATAM CITY

Rosa Hutahaean¹, Timbul Dompok²

^{1,2} Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia

E-mail: pb201010023@upbatam.ac.id

Abstrak: Kota Batam menawarkan konteks yang kaya dan dinamis untuk menguji teori Handoko mengenai efektivitas perencanaan, mengingat tantangan unik yang dihadapinya dan keragaman aspek yang perlu dikelola dalam proses perencanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas perencanaan daerah dalam pembangunan di Kota Batam menggunakan teori Handoko (2015) tentang Efektivitas Perencanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Lokasi penelitian ini berfokus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, yang memiliki TUPOKSI berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Secara umum, perencanaan daerah di Kota Batam menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam hal kegunaan, ketepatan, objektivitas, dan akuntabilitas. Namun, ada beberapa area yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam efektivitas biaya dan ketepatan waktu pelatihan serta penelitian. Untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, disarankan agar Bapedalitbangda Kota Batam, 2024 fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan mendukung lebih banyak penelitian dan kajian yang relevan.

Kata Kunci: *Efektivitas, Perencanaan, Pembangunan Daerah*

Abstract: Batam City offers a rich and dynamic context for testing Handoko's theory on planning effectiveness, given its unique challenges and the diversity of aspects that need to be managed in the planning process. This study aims to analyze and evaluate the effectiveness of regional planning in Batam City using Handoko's (2015) theory on Planning Effectiveness. The research employs a qualitative approach with a literature study method. The research location focuses on the Regional Development Planning Agency (Bapedalitbangda) of Batam City, which has duties and functions based on the Minister of State for Administrative Reform and Bureaucratic Reform Regulation No. 29 of 2010 concerning Guidelines for the Preparation of Performance Determination and Accountability Reporting of Government Agencies. The results indicate that, in general, regional planning in Batam City shows high effectiveness in terms of usefulness, accuracy, objectivity, and accountability. However, there are areas requiring special attention, particularly in cost-effectiveness and the timeliness of training and research. To enhance planning effectiveness, it is recommended that Bapedalitbangda Batam City in 2024 focus on improving human resource capacity and supporting more relevant research and studies.

Keywords: *Effectiveness, Planning, Regional Development*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang sulit dikendalikan atau direncanakan secara efektif dari tingkat pusat. Implementasi perencanaan daerah di

Indonesia dapat dilihat melalui dua kerangka utama: Propenas (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan Propeda (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Propenas adalah dokumen strategis yang menyusun rencana pembangunan jangka menengah di

tingkat nasional, sementara Propeda merinci rencana pembangunan di tingkat daerah. Kedua dokumen ini bertujuan untuk mengarahkan upaya pembangunan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal, serta mendukung implementasi otonomi daerah.

Perhatian terhadap otonomi daerah mencerminkan pemahaman bahwa pembangunan yang efektif memerlukan pendekatan yang lebih desentralisasi, di mana perencanaan dan pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan dinamika spesifik daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan model perencanaan terpusat yang sering kali gagal mengakomodasi perbedaan kebutuhan dan tantangan di berbagai daerah.

Penerapan Propenas dan Propeda diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memastikan bahwa pembangunan lebih terarah dan relevan dengan kebutuhan lokal. Melalui otonomi daerah, diharapkan adanya peningkatan dalam efisiensi dan efektivitas perencanaan serta pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Hal ini pada akhirnya dapat berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan akses terhadap layanan publik, memperbaiki infrastruktur, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Visualisasi data ini dapat dilihat pada gambar 1. Berikut:

Gambar 1. IDM dan Presentase Penduduk Miskin di Kota Batam

Sumber: Bapedalitbangda Kota Batam, 2024

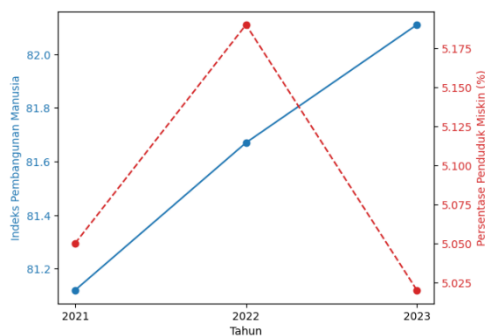
Berdasarkan gambar 1. Dapat di analisis bahwa data yang tersedia menunjukkan bahwa dari tahun 2021 hingga 2023, IDM mengalami peningkatan secara bertahap dari 81.12 menjadi 82.11, sedangkan persentase penduduk miskin menunjukkan fluktuasi ringan, dengan nilai 5.05% pada 2021, meningkat menjadi 5.19% pada 2022, dan kemudian sedikit menurun menjadi 5.02% pada 2023.

Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara IDM dan persentase penduduk miskin. Ini berarti bahwa seiring dengan meningkatnya IDM, persentase penduduk miskin cenderung menurun, meskipun tidak secara signifikan.

Grafik visualisasi data menunjukkan bahwa meskipun IDM terus meningkat, perubahan dalam persentase penduduk miskin tidak mengikuti pola yang sama secara konsisten, dengan fluktuasi minor selama periode tersebut. Peningkatan IDM yang diikuti oleh penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2023 dapat mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Batam mulai menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi kemiskinan, meskipun dampaknya belum sepenuhnya stabil.

Meskipun ada tren positif yang menunjukkan bahwa peningkatan dalam kualitas pembangunan manusia mungkin berhubungan dengan penurunan kemiskinan, fluktuasi dalam persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa faktor lain juga mempengaruhi hasil tersebut. Perencanaan daerah yang efektif di Kota Batam memerlukan perhatian yang

Indeks Pembangunan Manusia dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Batam



lebih mendalam terhadap strategi yang dapat mengurangi kemiskinan secara lebih konsisten seiring dengan peningkatan IDM. Berikut indikator kinerja utama Bapedalitbangda Kota Batam dalam memaksimalkan fungsinya sebagai perencana Daerah Kota Batam:

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Bapedalitbangda Kota Batam:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
|----|---|---|--------------------------------|-----------|
| 1 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan | Jumlah kegiatan perencanaan yang melibatkan masyarakat setiap tahunnya | Musrenbang dan Forum SKPD (78) | 100% |
| 2 | Meningkatnya efektifitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan | KUA-PPAS, KUAP-PPASP, RKPDP | 100% |
| | | Jumlah pelatihan/bimtek perencanaan dan penataan ruang | 11 bimtek dan workshop | 0% |
| | | Jumlah hasil penelitian/kajian yang menunjang pembangunan | 3 kajian | 0% |
| | | Jumlah data publikasi hasil pembangunan yang valid dan akuntabel | Publikasi 1 buku (BDA) | 100% |
| | | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan | Laporan per triwulan 2015 (4) | 100% |

Sumber: Lakip Bapedalitbangda Kota Batam, 2024

Alfiandri dan Mahadiansar (2020) menyebutkan bahwa munculnya perubahan organisasi serta pengalihan wewenang

mengakibatkan dampak buruk terhadap Free Trade Zone (FTZ) di Kota Batam. Hal ini menyebabkan adanya dualisme kepemimpinan antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusaha (BP) Batam serta melemahnya perekonomian global yang berdampak ke daerah, salah satunya di Kota Batam. Iklim investasi di Kota Batam terhambat karena pelayanan pengurusan dengan FTZ menjadi lambat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan perubahan status dari FTZ ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dipimpin oleh Wali Kota Batam. Tujuan dari penelitian mereka adalah melihat dampak perubahan perencanaan dari perubahan organisasi FTZ ke KEK.

Zaenudin et al. (2018) juga menemukan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Batam secara berurutan adalah adanya dualisme kelembagaan dan/atau kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, menurunnya investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam, masalah pengangguran, ketidakpastian hukum akibat seringnya pergantian kebijakan, masalah perburuhan, penurunan daya saing Batam, dan permasalahan sosial. Selain itu, dari hasil penelitian juga muncul beberapa alternatif kebijakan yang dapat diterapkan di Batam, antara lain mempertahankan kebijakan FTZ di Batam, penerapan kebijakan KEK di Batam, dan menerapkan otonomi khusus di Batam. Urutan berikutnya adalah diterapkannya Batam sebagai pusat kawasan industri, mengembalikan kebijakan Batam seperti tahun 1970-1990an, dikelola oleh Otorita Batam, dan menerapkan otonomi penuh oleh Pemko Batam seperti daerah lainnya di Indonesia.

Tangkudung et al. (2007)

menemukan bahwa adanya konflik dalam pengelolaan kota Batam antara Pemerintah Kota dan Badan Otorita. Konflik ini mengikuti pola Louis Pondy, yakni lima tahapan atau jenis konflik. Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi konflik dalam pengelolaan kota Batam, khususnya dalam perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Konflik yang terjadi di Batam sudah dapat dikatakan sebagai konflik termanifestasi sesuai dengan model tahapan konflik Pondy. Dampak dari konflik tersebut terhadap pengelolaan kota antara lain berdampak pada pelayanan publik dan perkembangan kota Batam.

Maka dari itu dibutuhkan analisis mengenai bagaimana efektivitas perencanaan Daerah Kota Batam lewat Bapedalitbangda Kota Batam, 2024 untuk optimalisasi pembangunan Daerah. Menurut Pekei (2016), efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, atau bisa dikatakan sebagai ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari suatu organisasi. Efektivitas juga terkait dengan derajat keberhasilan operasi di sektor publik, di mana suatu kegiatan dikatakan efektif jika memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi sasaran. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan biaya serendah mungkin dan waktu secepat mungkin.

Faktor-faktor yang menentukan efektivitas meliputi:

- 1) Sumber daya manusia, seperti tenaga kerja dan kemampuan kerja, serta sumber daya fisik seperti peralatan

kerja, tempat bekerja, dan dana keuangan.

- 2) Struktur organisasi, yang stabil dari jabatan-jabatan baik struktural maupun fungsional.
- 3) Teknologi, yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Dukungan, kepada aparatur dan pelaksanaan dari pimpinan dan masyarakat.
- 5) Kepemimpinan, yang mampu mengkombinasikan keempat faktor tersebut menjadi usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Tangkilisan (2005) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal menggunakan alat-alat dan sumber daya yang ada. Menurut Siagian (2001), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan barang dan jasa dari kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan; semakin tepat sasaran hasil kegiatan, semakin tinggi efektivitasnya. S.P. Siagian (2008) mengemukakan kriteria atau ukuran pencapaian tujuan yang efektif sebagai berikut:

- a) Kejelasan tujuan, yang hendak dicapai agar karyawan dapat mencapai sasaran dengan tepat.
- b) Kejelasan strategi, pencapaian tujuan agar para implementer tidak tersesat dalam mencapai tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan, yang mantap untuk menjembatani tujuan dengan usaha

pelaksanaan operasional.

- d) Perencanaan yang matang, untuk menentukan apa yang akan dilakukan organisasi di masa depan.
- e) Penyusunan program yang tepat, agar pelaksana memiliki pedoman dalam bertindak.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, untuk bekerja secara produktif.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, agar organisasi mencapai sasarnya.

Menurut Gie (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas meliputi waktu, tugas, produktivitas, motivasi, evaluasi kerja, pengawasan, lingkungan tempat kerja, serta perlengkapan dan fasilitas. Dharma (2003) menyatakan bahwa perencanaan adalah proses penetapan tujuan dan cara mencapainya, yang mencakup tujuan, alasan, cara, orang yang akan melakukannya, tempat, dan waktu. Perencanaan memungkinkan adanya pengendalian yang efektif dan mencakup standar untuk menilai kegiatan. Handoko (2015) menambahkan bahwa perencanaan adalah proses yang berlanjut dan mungkin memerlukan modifikasi selama implementasi dan pengawasan. Fleksibilitas sangat penting dalam perencanaan agar bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi baru.

Adisasmito (2009) menegaskan pentingnya perencanaan dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan politik, mencakup identifikasi aspek lingkungan, persyaratan legal, kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran, serta program manajemen. Azwar (1998) menyebutkan tujuan perencanaan adalah membantu pelaksana memahami rencana, membuat perencanaan masa depan, mengatur waktu dan sumber daya, serta memperoleh dukungan legislatif, moral, dan finansial.

Menurut Herlambang (2013),

manfaat perencanaan meliputi pencapaian tujuan, menentukan jenis dan struktur organisasi, jumlah staf, efektivitas kepemimpinan, dan standar pengawasan. Namun, perencanaan juga memiliki kelemahan seperti keterbatasan informasi masa depan, biaya, hambatan psikologi, dan menghambat inisiatif serta tindakan baru. Langkah-langkah perencanaan menurut Herlambang (2013) meliputi analisis situasi, identifikasi masalah, menentukan tujuan program, mengkaji hambatan, dan menyusun rencana kerja operasional.

Penelitian ini berjudul "*Efektivitas Perencanaan Daerah Dalam Pembangunan Daerah Di Kota Batam*" menggunakan teori Handoko (2015) tentang efektivitas perencanaan yang terdiri dari beberapa aspek. Pertama, kegunaan, di mana perencanaan harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain. Kedua, ketepatan dan objektivitas, di mana rencana harus dievaluasi untuk memastikan kejelasan, keringkasan, realitas, dan akurasi. Keputusan dan kegiatan manajemen hanya akan efektif jika didasarkan pada informasi yang tepat dan objektif. Ketiga, ruang lingkup, yang mencakup prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi, serta memperhatikan cakupan rencana, siapa yang terlibat, bagaimana kerangka hubungan antar kegiatan, dan satuan-satuan kerja atau departemen yang terlibat. Keempat, efektivitas biaya yang mencakup waktu, usaha, dan aliran emosional yang terlibat dalam proses perencanaan. Kelima, akuntabilitas, yang berarti tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan implementasi rencana harus jelas. Terakhir, ketepatan waktu, di mana perubahan yang cepat dapat menyebabkan rencana menjadi

tidak tepat atau tidak sesuai untuk berbagai perbedaan waktu. Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas perencanaan daerah dalam pembangunan di Kota Batam berdasarkan aspek-aspek yang telah dijelaskan di atas.

METODE

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif sendiri merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mencari tahu dan meneliti mengenai suatu fenomena yang terjadi dan masih belum banyak diketahui oleh masyarakat atau belum terbukti hasilnya. Selain itu, penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara holistik sesuai dengan sudut pandang peneliti, atau dengan kata lain kunci yang harus dipegang dalam penelitian kualitatif adalah eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif (Sulaiman, 2023). Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian deskriptif menurut Sugiyono dalam Santoso (2021) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai suatu variabel tanpa membentuk suatu perbandingan atau dihubungkan dengan variabel lainnya. Tujuan dari penggunaan data deskriptif adalah untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari pengamatan terhadap orang-orang dan perilakunya.

Dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang tentunya sesuai dengan pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan menggunakan studi literatur yang didapat dari berbagai sumber e-book ataupun

kepustakaan. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumen yang dapat diperoleh melalui buku, berita resmi, ataupun jurnal untuk dijadikan acuan dalam penelitiannya. Peneliti juga bisa menggunakan jenis data sekunder, yang diperoleh melalui penelitian-penelitian yang telah ditulis sebelumnya, sumber-sumber dari internet, media massa seperti koran, buku cetakan, hingga media elektronik. Jenis sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan lembaga yang dibutuhkan, sedangkan data sekunder diperoleh dari perpustakaan atau penelitian-penelitian lain yang dianggap relevan (Bambang, 2022).

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu analisis literature review atau studi kepustakaan, sumber valid dari internet, dan buku-buku cetakan maupun elektronik. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Menurut Miles & Huberman (1994), analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini berfokus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, yang memiliki TUPOKSI berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas

kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.



Gambar 2. Peta Wilayah Administrasi Kota Batam

Sumber: Bapedalitbangda Kota Batam, 2024

Penelitian ini dilakukan di Kota Batam karena Kota Batam menawarkan konteks yang kaya dan dinamis untuk menguji teori Handoko mengenai efektivitas perencanaan, mengingat tantangan unik yang dihadapinya dan keragaman aspek yang perlu dikelola dalam proses perencanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mencapai dampak yang diinginkan dalam perencanaan Daerah, penting bagi proses perencanaan daerah untuk terus disempurnakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta memastikan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif. Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, pembangunan daerah dapat benar-benar memenuhi tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai hasil yang berkelanjutan. Pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori Handoko (2015) dengan framework sebagai berikut:



Gambar 3. Efektivitas Perencanaan (Handoko, 2015)

Analisis efektivitas perencanaan daerah di Kota Batam mencakup beberapa aspek penting untuk mengevaluasi sejauh mana perencanaan tersebut mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berikut adalah analisis berdasarkan beberapa kriteria utama:

a. Kegunaan Perencanaan Daerah

Perencanaan daerah di Kota Batam, seperti dalam kerangka Proopenas (RPJMN) dan Propeda (RPJMD), memiliki kegunaan utama dalam mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan lokal. Melalui perencanaan yang sistematis, pemerintah daerah dapat merancang program-program yang sesuai dengan potensi dan tantangan spesifik Batam. Ini termasuk pengembangan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Kegunaan perencanaan ini terwujud dalam penyesuaian kebijakan yang lebih tepat sasaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara yang lebih terarah dan terukur.



Gambar 4. Hubungan antar dokumen perencanaan Kota Batam

Sumber: Bapedalitbangda Kota Batam, 2024

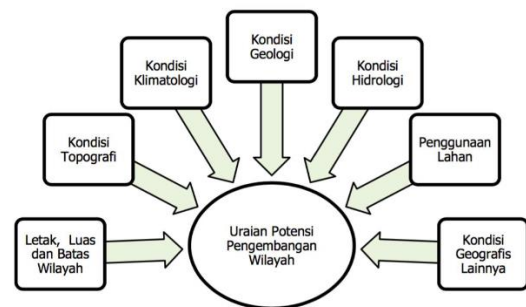
Kegunaan perencanaan daerah berkaitan dengan sejauh mana perencanaan yang dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pengembangan wilayah. Musrenbang dan Forum SKPD yang melibatkan masyarakat membantu memastikan bahwa perencanaan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dokumen perencanaan seperti KUA-PPAS, KUAP-PPASP, dan RKPD yang dihasilkan menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan memberikan panduan yang jelas untuk pelaksanaan pembangunan.

Kegunaan perencanaan daerah dapat dilihat dari tren peningkatan IDM dan fluktuasi dalam persentase penduduk miskin. IDM yang meningkat dari 81.12 pada 2021 menjadi 82.11 pada 2023 menunjukkan bahwa perencanaan daerah telah berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup, yang sesuai dengan tujuan pembangunan yang direncanakan. Meskipun persentase penduduk miskin mengalami sedikit fluktuasi, penurunan kecil dari 5.19% menjadi 5.02% menunjukkan adanya dampak positif dari perencanaan terhadap pengurangan kemiskinan.

b. Ketepatan dan Objektivitas

Ketepatan dan objektivitas perencanaan daerah di Kota Batam mempengaruhi sejauh mana rencana yang disusun dapat mengatasi masalah yang ada dan merespons dinamika perubahan. Perencanaan yang efektif harus didasarkan pada data yang akurat dan analisis yang mendalam. Dalam konteks Batam, ketepatan perencanaan dapat diukur dari seberapa baik rencana

yang dibuat mencerminkan kondisi sosial-ekonomi dan kebutuhan riil masyarakat. Objektivitas juga memerlukan penghindaran dari kepentingan politik semata, dengan fokus pada data empiris dan indikator objektif yang relevan untuk perencanaan pembangunan.



Gambar 5. Kerangka Pemikiran Pengembangan Daerah Kota Batam

Sumber: Bapedalitbangda Kota Batam, 2024

Ketepatan dan objektivitas perencanaan daerah merujuk pada seberapa akurat dan tidak bias perencanaan dalam menangani isu-isu pembangunan. Capaian 100% dalam dokumen perencanaan pembangunan menunjukkan ketepatan dalam menyusun rencana yang sesuai dengan kebutuhan daerah Kota Batam. Publikasi hasil pembangunan yang valid dan akuntabel menunjukkan bahwa informasi yang disajikan objektif dan dapat dipercaya.

Ketepatan dan objektivitas perencanaan dapat dinilai dari seberapa baik data ini mencerminkan kebutuhan masyarakat. IDM yang terus meningkat menunjukkan bahwa perencanaan berdasarkan data yang akurat dan analisis yang tepat telah dilakukan. Namun, fluktuasi dalam persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa mungkin ada variabel eksternal yang mempengaruhi hasil, sehingga perencanaan perlu lebih objektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup perencanaan daerah di Batam mencakup berbagai aspek penting seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perencanaan yang komprehensif harus melibatkan semua sektor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Di Batam, ruang lingkup perencanaan harus meliputi pengembangan kawasan industri, perumahan, sistem transportasi, serta perlindungan lingkungan. Luas dan kedalaman ruang lingkup ini menentukan seberapa holistik dan terintegrasinya pendekatan perencanaan terhadap berbagai isu yang ada.

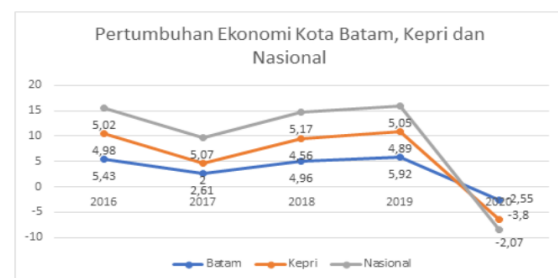
Ruang lingkup perencanaan daerah mencakup seberapa luas dan komprehensif perencanaan mencakup berbagai aspek pembangunan. Penghasilan dokumen seperti KUA-PPAS, KUAP-PPASP, dan RKPD menunjukkan bahwa ruang lingkup perencanaan mencakup berbagai aspek penting dari pembangunan, termasuk infrastruktur, penggunaan lahan, dan pemukiman. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan memastikan bahwa ruang lingkup mencakup berbagai perspektif dan kebutuhan.

Ruang lingkup perencanaan di Batam mencakup indikator sosial-ekonomi penting seperti IDM dan persentase kemiskinan. Dengan fokus pada indikator ini, perencanaan daerah tampaknya mencakup aspek penting dari pembangunan yang berdampak langsung pada kualitas hidup. Namun, untuk evaluasi yang lebih menyeluruh, ruang lingkup perencanaan harus mencakup lebih banyak aspek seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan lingkungan.

d. Efektivitas Biaya

Efektivitas biaya merupakan

indikator penting dalam mengevaluasi perencanaan daerah. Di Batam, efektivitas biaya dapat dianalisis dari seberapa efisien anggaran yang dialokasikan digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Ini termasuk perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktual serta hasil yang diperoleh. Efektivitas biaya juga berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal dan penghindaran dari pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu.



Gambar 6. Pertumbuhan Ekonomi (%) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Pada tahun 2019, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 11,97 persen, diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan 9,62 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berdampak positif pada tingkat hunian kamar. Dari 17 lapangan usaha yang ada, hampir semuanya menunjukkan pertumbuhan positif, kecuali Transportasi dan Pergudangan (-17,02 persen) serta Jasa Perusahaan (-8,74 persen), yang mengalami penurunan.

Selain itu, enam lapangan usaha mengalami peningkatan pertumbuhan, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan 6,35 persen; Pertambangan dan Penggalian dengan 1,43 persen; Industri

Pengolahan dengan 7,00 persen; Pengadaan Listrik dan Gas dengan 4,23 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang dengan 7,23 persen; serta Real Estate dengan 2,10 persen. Sebaliknya, sepuluh lapangan usaha mengalami perlambatan pertumbuhan, antara lain: Konstruksi sebesar 6,92 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan 4,51 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan 9,62 persen; Informasi dan Komunikasi dengan 11,97 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi dengan 4,94 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial dengan 1,08 persen; Jasa Pendidikan dengan 0,71 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan 2,10 persen; dan Jasa Lainnya dengan 1,97 persen. Namun, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan pada pertumbuhan sektor-sektor lapangan usaha dibandingkan dengan tahun 2019.

Efektivitas biaya mengukur apakah sumber daya yang digunakan dalam perencanaan memberikan hasil yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Meskipun dokumen perencanaan dan publikasi hasil pembangunan mencapai 100%, kesenjangan dalam pelatihan/bimtek dan penelitian/kajian menunjukkan bahwa biaya mungkin belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kapasitas dan dukungan penelitian.

Efektivitas biaya dapat dilihat dari peningkatan IDM dan sedikit penurunan dalam persentase penduduk miskin. Jika anggaran yang dialokasikan untuk program-program pembangunan berkontribusi pada peningkatan IDM dan pengurangan kemiskinan, ini menunjukkan bahwa biaya

telah digunakan secara efektif. Namun, tanpa data anggaran spesifik, penilaian efektivitas biaya harus didasarkan pada analisis hasil yang dicapai dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam perencanaan daerah di Batam melibatkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa ada mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mengawasi implementasi perencanaan. Publikasi laporan kinerja dan penggunaan anggaran, serta adanya forum untuk umpan balik masyarakat, adalah bagian penting dari akuntabilitas. Akuntabilitas juga mencakup tindak lanjut terhadap hasil evaluasi untuk memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan rencana.

Akuntabilitas dalam perencanaan daerah terkait dengan sejauh mana hasil perencanaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Publikasi buku (BDA) dengan capaian 100% menunjukkan bahwa ada usaha yang signifikan dalam menyediakan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada public di Kota Batam. Laporan per triwulan yang terbit tepat waktu menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan.

Akuntabilitas dapat dinilai dari transparansi dan pelaporan hasil yang dicapai. Jika perencanaan daerah di Batam melibatkan publikasi laporan tentang kinerja dan penggunaan anggaran, serta adanya forum untuk umpan balik masyarakat, maka akuntabilitas dianggap baik. Evaluasi ini penting untuk

memastikan bahwa rencana yang telah disusun diimplementasikan dengan benar dan transparan.

f. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan perencanaan daerah di Batam adalah aspek kritis yang menentukan apakah proyek-proyek pembangunan selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Keterlambatan dalam pelaksanaan dapat mengurangi manfaat yang diharapkan dari rencana yang telah disusun. Evaluasi ketepatan waktu melibatkan analisis apakah proyek-proyek berjalan sesuai rencana awal atau mengalami keterlambatan, serta dampak dari keterlambatan tersebut terhadap hasil pembangunan.

Ketepatan waktu merujuk pada sejauh mana perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Capaian 100% dalam dokumen perencanaan dan laporan monitoring menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Kesenjangan dalam pelatihan/bimtek dan penelitian menunjukkan adanya keterlambatan atau kekurangan dalam beberapa aspek yang mempengaruhi ketepatan waktu.

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan proyek dapat dievaluasi dari apakah proyek pembangunan selesai sesuai jadwal atau mengalami keterlambatan. Peningkatan IDM dan perbaikan kecil dalam persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa ada kemungkinan proyek-proyek pembangunan yang sesuai dengan jadwal, tetapi tanpa data spesifik mengenai waktu pelaksanaan, penilaian ketepatan waktu bersifat indikatif.

SIMPULAN

Secara umum, perencanaan daerah di Kota Batam menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam hal kegunaan, ketepatan, objektivitas, dan akuntabilitas. Namun, ada beberapa area yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam efektivitas biaya dan ketepatan waktu pelatihan serta penelitian. Untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, disarankan agar Bapedalitbangda Kota Batam, 2024 fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan mendukung lebih banyak penelitian dan kajian yang relevan, serta memastikan bahwa semua kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai anggaran. Evaluasi efektivitas perencanaan daerah di Kota Batam harus mempertimbangkan kegunaan perencanaan, ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Perencanaan yang efektif diharapkan dapat mengarahkan pembangunan daerah dengan lebih baik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mencapai hasil yang diinginkan secara efisien dan berkelanjutan. Melalui evaluasi yang komprehensif, pemerintah daerah dapat terus memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat Batam.

DAFTAR PUSTAKA

- Pekei, B. (2016). *Konsep dan analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah di era otonomi*. Penerbit Taushia.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen publik*. Grasindo.

- Siagian, Sondang P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Gie, The Liang. (2007). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty
- Dharma, Agus. (2003). *Manajemen Supervisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sudaryana, D. E. A., Ak, M., Agusiady, H. R., & SE, M. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Deepublish.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Santoso, I., & Madiistriyatno, H. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Indigo Media.
- Sulaiman, U. (2023). Aneka Jenis Penelitian. *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 36-46.
- Handoko, T. hani. (2015). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Adisasmito, Wiku. (2009). *Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakity*. Jakrta: Rajawali Pers.
- Azwar, Rihna Azrul. (1998). *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Grafiti Medika Pers.
- Herlambang, Susatyo. (2013). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Alfiandri, A., & Mahadiansar, M. (2020). Dampak Perencanaan Perubahan Free Trade Zone Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Di Kota Batam. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *4*(2), 292-307.
- Zaenuddin, M., Kumorotomo, W., Saleh, S., & Hadna, A. H. (2018). Identifikasi Permasalahan Pasca Diterapkan Otonomi Daerah Di Kota Batam Dan Alternatif Solusi Kebijakan Mendatang. In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan* (pp. 1095-1104).
- Tangkudung, Auderey Gamaliel Dotulong; Purnawan Junadi, Syamsul Bahrum, Asrar Hadi, Tambunan, Rudy Parluhutan. (2007). *Konflik Dalam Pengelolaan Kota Batam*. Jakarta: Universitas Indonesia.